

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផ្ទៃក្នុង

PARAREM DESA ADAT KEDONGANAN



ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

NOMOR: 001 TAHUN 2023

ឃុំក្រុងស្រីរាជ្យ
ឃុំក្រុងស្រីរាជ្យ

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT KEDONGANAN**



សមរាម្យឱវាណាធិបតីភ្នំពេញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃ
រដ្ឋបាលក្រុងបាឌីបាត

**PARAREM DESA ADAT KEDONGANAN
NOMOR: 001 TAHUN 2023**

ឃុំភ្នំពេញ
ភ្នំពេញ

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT
DAN PRAJURU DESA ADAT KEDONGANAN**

មុនសិទ្ធិ

MURDACITTA

Desa Adat Kedonganan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Kedonganan merupakan Desa Anyar, yang diperkirakan ada sejak tahun 1500, yang memiliki warisan konsep Desa Tua, yang ditandai dengan adanya Pura Penataran. Konsep Pura Penataran merupakan salah satu Pura Pangider Desa yang diperkirakan dibawa oleh leluhur Kedonganan dari Desa Tua di sekitar, yaitu Kampial, Kutuh, dan Peminge. Pura Penataran adalah pura yg pertama kali ada di Kedonganan, kemudian disusul dengan adanya Pura Kahyangan Tiga sebagai ciri desa anyar. Desa Adat Kedonganan pada riwayatnya dalam pemilihan Bendesa Adat, didasarkan pada pasuaran krama dalam Paruman Agung Desa Adat setiap 5 tahun.

Bahwa ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34)
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4)
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA)
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat
8. Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa/Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat
9. Awig-Awig Desa Adat Kedonganan Tahun 1989.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Kedonganan yang dilaksanakan pada hari Redite Umanis Menail, tanggal Masehi 26 Maret 2023, bertempat di Balai Desa Desa Adat Kedonganan, memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Kedonganan
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka di Desa Adat Kedonganan
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Kedonganan
- 4) Krama Pangarep adalah krama desa adat yang sudah tercatat dalam registrasi di Desa Adat, yang mempunyai hak dan kewajiban yang utama

- 5) Krama Lemetenan adalah krama desa adat yang sudah digantikan ayahnya oleh krama pangarep
- 6) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Kedonganan
- 7) Bendesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Kedonganan
- 8) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 9) Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Kedonganan
- 10) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Kedonganan;

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

- a. *Kawigunan (manfaat)*,
- b. *Padumpada (keadilan)*,
- c. *Manyama braya (kekeluargaan)*,
- d. *Sarwa ada (saling melengkapi/keberagaman)*
- e. *Sareng sareng (partisipasi)*,
- f. *Gilik saguluk (soliditas/kebersamaan)*,
- g. *Para sparos (musyawarah)*,
- h. *Salunglung sabayantaka (gotong royong)*

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang*

Bandesa dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat;

- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian
- g. Tahap Penggantian Antar Waktu
- h. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
- i. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikan*
 - d. *Patengen*
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhagabhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pangarep dan Krama Lemetenan
- b. Pernah menjadi Prajuru Kelembagaan Desa Adat, atau memiliki pengalaman kepanitiaan karya Desa Adat
- c. Nenten Ceda Angga
- d. Bertempat tinggal di wawidangan Desa Adat Kedonganan, atau memiliki Dadya di Desa Adat Kedonganan
- e. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat
- f. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat *ngadegang*
- g. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat
- h. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali
- j. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan
- k. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat
- l. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat
- m. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat
- n. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pangarep dan Krama Lemetenan

- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat, atau memiliki Dadya di Desa Adat Kedonganan
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat
- g. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- i. Umur sekurang-kurangnya 20 Tahun;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*)
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan

Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bendesa Adat

- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Menyusun Jadwal Tahapan
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pajaya-jayaan*.

BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau bakal calon Prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh **krama pangarep**, dengan mekanisme penjaringan melalui banjar adat

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau bakal calon Prajuru desa adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat
- (2) Setiap Banjar Adat dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang calon Bandesa Adat dan 4 (empat) bakal calon Prajuru desa adat
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Banjar Adat sendiri dan/atau berasal dari Banjar Adat lainnya.
- (4) Hasil musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat di tingkat Banjar Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14, dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat.

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat dari Banjar Adat
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk

menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;

- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa Adat dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat di Balai Desa.
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pangarep atau sekurang-kurangnya melalui Paruman Madya Desa Adat, dengan ketentuan yang diatur sesuai Pararem Sabha Pamutus Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar calon
- (6) Panitia Pemilihan meminta pasuaran Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara musyawarah dan mufakat

Pasal 22

- (1) Kepada peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah, dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara meminta pasuaran dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuaran dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi pasuaran dari peserta paruman sebagai Bandesa Adat terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat
- (2) Pengisian anggota keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan
- (4) Pengisian anggota keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan **selambat-lambatnya 30 hari sebelum** dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya
- (3) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (4) Pengesahan Bandesa Adat terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara
- (5) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka paruman dapat dilaksanakan melalui Paruman Madya Desa Adat dengan ketentuan yang bisa mengikuti, diatur sesuai Pararem Sabha Pamutus Desa Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pamegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Puseh Desa, pada Purnama Sasih Kadasa, dengan dipuput oleh Ida Sulinggih,
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pamegat ayah atau Mapegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput Ida Sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3)
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pamegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan

BAB X
PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuaran* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kerta Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan
- (2) Kerta Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam

waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima

- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Desa Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas ngadegang
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima putusan Kerta Desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kerta Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon
- (6) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kerta Desa dan/atau Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang, baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menguatkan atau menganulir putusan Kerta Desa.

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

- (1) Bandesa dan/atau Prajuru Desa berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar awig-awig Desa Adat
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat
- (3) Karena Patajuh Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat

- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh Bandesa Adat, Panyarikan/Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Untuk pemilihan Prajuru Desa Adat masa bakti 2023-2028, dengan ketentuan mengenai tahapan penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan musyawarah pemilihan, seperti tercantum di Pasal 12 s/d Pasal 25, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang dipilih pada saat Paruman Desa, pada tanggal 1 Februari 2023, dimana saat pelaksanaannya, Pararem ini belum ada atau belum diregistrasi, dinyatakan sah sebagai Prajuru Desa Adat masa bakti 2023-2028.
- (3) Keputusan Paruman Desa, tanggal 1 Februari 2023, terkait penetapan & pengesahan Bendesa & Prajuru Desa Adat masa bakti 2023-2028, dinyatakan sah.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan Prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami Pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka Pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



BANDESA ADAT,

Wayan Sutarja

WAYAN SUTARJA

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL:
PANYARIKAN DESA ADAT



IKADEK SUPARTA, S.T

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0089/PRM/MDAP/III/2023
TANGGAL : 29 MARET 2023
BANDESA AGUNG



MAJELIS DESA ADAT
PROVINSI BALI
IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 9 April 2023

NOMOR REGISTRASI : P/0092/0417/020/04/DPMA/2023